

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KONSEP EKSPLOITASI
EKONOMI ANAK DALAM PASAL 13 UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 030 AS	o REG : S-2009/AS/030 ASLE BERU : TANGGAL :

Oleh :

ANDES DWIAN UTAMA

NIM : CO1304121

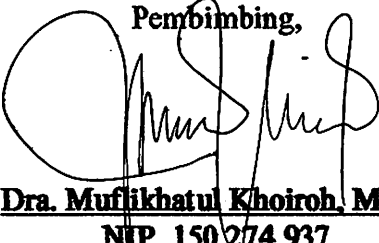
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Andes Dwian Utama ini telah diperiksa dan telah
disetujui untuk diujikan.**

Surabaya, 13 Februari 2009

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 150 274 937

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Andes Dwian Utama
NIM : C01304121
Semester : IX
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : R.T./R.W. 007/004 Ds. Suwaluh Kec. Pakel Kab. Tulungagung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”** ini adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2009
Pembuat pernyataan


Andes Dwian Utama
NIM. C01304121

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Andes Dwian Utama ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

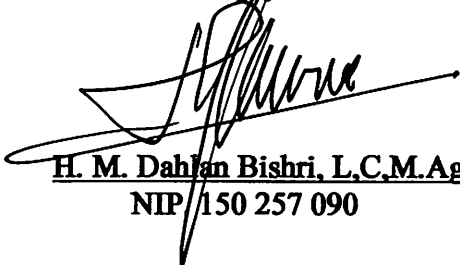
Ketua


Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 150 274 937


Sekretaris


Arif Wijaya, SH. M.Hum.
NIP. 150 368 916

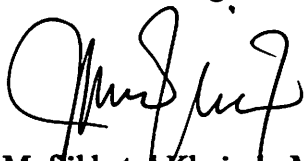
Penguji I


H. M. Dahlan Bishri, L.C.M.Ag.
NIP. 150 257 090

Penguji II


Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 150 256 478

Pembimbing


Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 150 274 937

Surabaya, Maret 2009

Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan


Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	18
A. Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Masyarakat	18
1. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	18
a. Hak Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang.....	18
b. Hak Perlindungan	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Anak merupakan penerus keturunan dan penerus bangsa sehingga beban berat dirasakan oleh setiap orang tua tersebut karena di pundak orang tua dibebankan kewajiban merawat, memelihara dan mensejahterakan anak untuk kemajuan bangsa. Dewasa ini, anak di bawah umur yang seharusnya dalam mengisi waktu sehari-hari mendapatkan pendidikan yang layak harus berhadapan dengan kerasnya dunia kerja yaitu terdapatnya para buruh pada dunia usaha yang terdiri dari anak-anak di bawah umur yang mengakibatkan banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja paruh waktu memberikan jasa di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa anak-anak tersebut.

Banyak terlihat anak-anak di bawah umur bekerja sebagai tukang semir sepatu, pengamen, tukang parkir, dan penjual koran. Bahkan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang, banyak sekali anak-anak yang seharusnya bersekolah di sekolah dasar dan lanjutan, terpaksa mereka berada di jalanan.

Calo-calo kadang-kadang dengan bantuan Kepala Desa, membujuk orang tua calon buruh migran untuk menyetujui mengirim anak-anak mereka bekerja ke luar negeri. Kemiskinan menjadi faktor pendorong yang mendasar. Anak-anak perempuan berusia 13-16 pergi ke luar negeri dengan paspor yang menyatakan bahwa umur mereka 20-25 tahun dalam rangka memenuhi kewajiban minimum umur. Untuk meyakinkan keamanan di kemudian hari, calo-calo sering kali memberi para orang tua dari anak-anak perempuan yang akan dipekerjakan sejumlah uang, sekitar Rp 75.000-100.000 yang dianggap sebagai angsuran pertama dari gaji anak-anak mereka. Calo-calo dari Malaysia mengambil anak-anak perempuan tersebut secara terbuka seharga 800-1500 RM (200-400 US\$ per orang).⁴

Nilai tersebut jika dirupiahkan mempunyai nilai sekitar Rp. 1.957.400,00- Rp. 3.914.800,00 dengan rincian Rp. 9.787,00 per 1 US\$/USD.⁵ Berikut adalah bentuk-bentuk perdagangan anak yang kemudian anak yang diperdagangkan

⁴ Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, *Buruh Migran Indonesia: Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Luar Negeri Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia*, h. 38

⁵ <http://www.my-indonesia.info/page.php?ic=141> tanggal 23 Oktober 2008 Pukul 12.33

Melihat masalah di atas bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang adanya eksploitasi anak dengan bentuk apapun terutama eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi anak di bawah umur secara penuh. Larangan eksploitasi anak tersebut apabila dilanggar akan dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁷

Jadi dalam persoalan diatas terdapat dua hal penting yang saling berkaitan yaitu tentang eksploitasi ekonomi dan mempekerjakan anak di bawah umur. Penulis melakukan penelitian secara pustaka tentang eksploitasi ekonomi anak sebagai tindakan *preventif* terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak-anak

⁶ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Publikasi Komnas Perempuan*, h. 137

⁷ UU RI No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 88

Dalam pembahasan proposal ini agar terarah secara terperinci, maka permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- [illegible]

sudut pandang hukum Islam demi kesejahteraan dengan mempertimbangkan hak-hak anak dalam keluarga dan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, membahas hal-hal yang menyangkut tentang metode penelitian, tahapan-tahapan pembahasan tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai Perlindungan Anak dari tindakan eksploitasi anak khususnya eksploitasi ekonomi anak.
- b. Data mengenai praktik-praktik serupa dengan eksploitasi ekonomi anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

. Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian. Sumber data penelitian ini adalah:

- 1) UU RI No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*, Bandung : Citra Umbara
- 2) Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara

Pada Bab ini berisi tentang A. Analisis konsep eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak B. Analisis hukum Islam terhadap konsep eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

“Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isrā: 31)”³

Bahwa wahyu Allah di atas adalah untuk semua kalangan. Di zaman industrialisasi sekarang ini banyak orang yang kesal mendapat banyak anak, banyak anak yang menjadi beban berat dan karena takut kemiskinan para orang tua anak menjual anak-anaknya. Menurut agama Islam suatu nyawa wajib dipelihara dan dilarang membunuh anak karena takut miskin.⁴ Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Keluarga, masyarakat dan negara harus memperhatikan kelangsungan hidup anak. anak-anak berhak mendapat gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik, pendidikan, informasi, waktu luang, dan berkreasi.

b. Hak Perlindungan

Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوْنُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. (Q.S. al-Anfāl: 27)

³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 428-429

⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XV*, h. 54-55

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Perkawinan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷

Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi yaitu pemeliharaan anak, nafkah anak dan pendidikan anak. Dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban suami istri diantaranya:

4. *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,*
 - b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,*
 - c. *Biaya pendidikan bagi anak.⁸*

Ketentuan tentang pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 Ayat 4

Para Ulama Fiqh mendefinisikan *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, sampai anak mampu berdiri sendiri.¹¹ Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya berarti membiarkan anak menderita. Memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.¹² *Hadanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, walaupun juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Jadi pendidikan (*tarbiyah*) termasuk dalam *hadanah*.

2) Nafkah kepada Anak

Allah Berfirman Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan

¹¹ *ibid*, h. 175-176

¹² S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 318

ayah dan ibu bersama-sama bertanggung jawab atas generasi penerus, baik dalam hal kesejahteraan, intelektual, spiritual, maupun akhlaknya. Tanggung jawab itu harus dijalankan bersama-sama dan tidak ada yang lebih ditekankan kepada siapa yang harus menanganinya.²⁰

- c. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.
- d. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Disini manusia diwajibkan memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.
- e. Syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan riba serta keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa.

Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

- b. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.
- e. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1976, Tanggal 2 November 1976, dinyatakan “menurut hukum adat seorang anak laki-laki dianggap telah dewasa kalau ia sudah cakap bekerja (*kuat gawe*). Tetapi jika sudah berumur 20 tahun pantas dianggap telah cakap bekerja sehingga harus dianggap telah dewasa maka ia harus bertanggung jawab atas

kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁰ Pelacuran dan pencabulan merupakan eksploitasi seksual, tetapi bentuk dari eksploitasi seksual tidak hanya berupa pelacuran dan pencabulan. Eksploitasi seksual mempunyai arti yang lebih luas dari pada pelacuran dan pencabulan. Eksploitasi seksual dalam arti prostitusi tersebut dilakukan kepada anak di bawah umur dikenal sebagai ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak). Eksploitasi seksual umumnya terjadi kepada perempuan dan anak perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya eksploitasi seksual kepada anak laki-laki. Termasuk di dalamnya perdagangan anak perempuan.

Global Survival Network mengidentifikasi 4 situasi yang mengakibatkan perempuan dan anak perempuan masuk dalam perdagangan seks: **pertama**, perempuan yang ditipu mentah-mentah dan dipaksa dengan kekerasan. **Kedua**, perempuan yang diberitahu separuh kebenaran dan kemudian dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang sebelumnya tidak mereka sepakati dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali pilihannya. **Ketiga**, perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka kerjakan dan tidak melihat adanya pilihan ekonomi lain walaupun mereka tidak mau mengerjakannya. **Keempat**, perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan, tidak keberatan untuk mengerjakannya memiliki

¹⁰ UU RI No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 Ayat 8

a. Perbudakan atau Serupa Perbudakan terhadap Anak di Bawah Umur

Pengertian perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum yang diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.¹⁶

Perbudakan anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi anak. Dewasa ini mungkin untuk perbudakan kepada anak di bawah umur sudah tidak banyak yang mengekspose dalam tataran kasus yang muncul namun praktik perbudakan atau praktik serupa perbudakan anak di bawah umur masih tinggi. Untuk saat ini praktik perbudakan anak berubah bentuk menjadi perdagangan anak di bawah umur. Jadi perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan anak.¹⁷

¹⁶ *ibid.*

17 **ibid,**
ibid,

2) Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak

Berikut adalah bentuk-bentuk perdagangan anak dan perempuan yang sebagian besar berakhir dengan diharuskannya anak bekerja dengan berbagai macam bentuk pekerjaan, diantaranya:

- a) Perdagangan anak untuk dipekerjakan di Jermal (lepas pantai), jumlah pekerja anak di bidang ini tidak diketahui pasti.
- b) Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik, anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik.
- c) Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pengemis, Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan pengemis.
- d) Peredaran anak dan perempuan untuk peredaran narkoba, beberapa kasus di Bali menunjukkan terjadinya pemanfaatan anak dan perempuan untuk peredaran narkoba.
- e) Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya. Anak dan perempuan dieksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan di kota-kota besar atau di daerah-daerah pusat hiburan.
- f) Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks, mereka yang melakukan pendampingan atau meneliti fenomena pelacuran memperkirakan bahwa sekitar 30% pekerja seks di Indonesia berusia kurang dari 18 tahun. Untuk fenomena itu, kalangan pekerja LSM menggunakan istilah "alya" 'anak yang dilacurkan'.
- g) Perdagangan anak perempuan sebagai konsumsi pedofil, eksploitasi anak oleh pedofil dapat terjadi dimanapun. Kadangkala media memberitakan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa tetangganya, guru, atau pihak-pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional.
- h) Perdagangan perempuan dalam bentuk 'perkawinan trans-nasional'. Salah satu jaringan yang dapat disebutkan sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan Cina di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki 'pemesan' dari Taiwan dan Hongkong.

anak merupakan kasus yang kompleks yang dapat menghubungkan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Keduanya dalam kasus ini menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan.

3) Penyebab Perdagangan Anak

Suyanto menjelaskan bahwa maraknya praktik perdagangan anak disebabkan berbagai faktor, yaitu:

- a) Adanya kepercayaan konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa hubungan seks dengan anak-anak sebagai obat kuat, obat awet muda, dan mendatangkan hoki tertentu.
- b) Anak-anak dipandang masih bersih dari penyakit kelamin dan belum banyak yang "memakainya".
- c) Orang tua terkadang memandang anak perempuan sebagai aset mendatangkan keuntungan, sehingga orang tua menjual anaknya.
- d) Orang tua terlilit hutang kepada pihak tertentu dan tidak sanggup membayar. Sebagai ganti orang tua menyerahkan anak-anaknya untuk dipekerjakan pada pihak yang memberi hutang.
- e) Anak pergi dari rumah dan masuk dalam sindikat perdagangan karena kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi.
- f) Lemahnya kapasitas aparat dan penegak hukum. Adanya keterlibatan aparat, tiadanya tindak pencegahan serta

Transplantasi adalah adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.²³ Hal perdagangan organ tubuh dan transplantasi organ tubuh anak untuk tujuan komersial (eksploitasi ekonomi) dilarang atas dasar alat dan atau jaringan tubuh manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan.²⁴ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang menjelaskan termasuk eksploitasi tindakan secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁵

²⁵ UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 Ayat 7

organ tubuh anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dapat dilakukan demi kesehatan anak.²⁸

d. Kerja Paksa atau Pelayanan Paksa oleh Anak di Bawah Umur

Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.²⁹ Yang dimaksud dengan "dipaksa" yaitu suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.³⁰

Kerja paksa atau pelayanan paksa dalam praktiknya tidak perlu adanya pemaksaan secara nyata pelaku kepada korban baik dengan ancaman atau dengan cara lain agar korban mau mengikuti pelaku, Berkaitan dengan eksploitasi anak batasan kerja paksa adalah ketika memberikan pengertian kepada anak untuk melakukan sesuatu sehingga anak tersebut yakin jika tidak melakukan apa yang diperintahkan pelaku maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Kerja paksa dalam perkembangan

²⁸ UU RI No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 47

²⁹ Penjelasan Atas UU RI No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, I Umum

³⁰ *ibid.*, Pasal 18

uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pekerja secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.³³ Soetarso dalam bukunya *Praktek Pekerjaan Sosial* mengungkapkan pekerja anak adalah:

- a) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak berhenti sekolahnya dan mengalami pelemahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).
- b) Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya,

³³ Bagong Suryanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, h. 6

disektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-perundangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau di eksploitasi, ada pula yang tidak.³⁴

2) Faktor Penyebab Terjadinya Anak di Bawah Umur yang Bekerja

Dari survei yang dilangsungkan oleh YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) Tahun 1984 bahwa ketidakmampuan orang tua memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan anak sehari-hari (84%) merupakan faktor utama yang menyebabkan anak untuk bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya tampaknya juga berpengaruh terhadap kecenderungan anak bekerja. Orang tua berpendapat bekerja pada usia dini merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak. Disamping faktor pendorong kemiskinan masyarakat, ada beberapa faktor penarik bagi perusahaan, antara lain pekerja anak mudah diatur, tidak membantah, mau bekerja dengan jam kerja panjang, dan mau dibayar murah.³⁶

Persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi dan menjadi semakin kompleks ketika krisis ekonomi melanda sejumlah negara-negara Asia, terutama Indonesia.³⁷ Di muka telah disinggung bahwa munculnya pekerja anak berkaitan dengan masalah kemiskinan, upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga selain mengikutsertakan istri dalam kegiatan publik

³⁶ *ibid*, h. 81-82

³⁷ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, h. 6

dewasa, tetapi posisi tawar-menawar (*bargaining position*) mereka jauh lebih lemah. Karena posisi tawar-menawar lemah, maka pekerja anak selain tidak banyak menuntut, juga besaran upahnya dapat ditekan di bawah tingkat produktivitas mereka.⁴²

Melihat dari beberapa faktor maraknya anak-anak di bawah umur bekerja di atas ada dua sebab yang menempati persentase terbanyak yaitu: pertama, faktor kemiskinan dari keluarga yang memaksa sebagian besar anak di bawah umur putus sekolah dan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dan faktor kedua yang menentukan adalah banyaknya pasar yang mengiginkan anak di bawah umur bekerja untuk perusahaan yaitu kepentingan menghemat biaya produksi, faktor ini juga besar peranannya dalam penimbunan anak-anak di bawah umur untuk bekerja mengingat bahwa selain dari *home industri* pendapatan negara dan perkembangan perekonomian Indonesia ditentukan oleh perusahaan swasta.

3) Fakta di Lapangan tentang Pekerja Anak

Di Indonesia jumlah pekerja pada bulan Oktober 1990 tercatat 2,05 juta anak, pada bulan Agustus 1997 menurun menjadi 1,64 juta anak. Akan tetapi pada bulan Desember 1998 terjadi peningkatan

⁴² *Ibid.*, h. 14-15

membuktikan adanya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Dan jelas munculnya pekerja anak dikarenakan kemiskinan yang berarti tujuan anak bekerja adalah untuk mencari nafkah bukan tujuan pendidikan sehingga unsur-unsurnya memenuhi unsur sebagai tindakan eksploitasi ekonomi. Demikian pula faktor kedua karena tingginya permintaan pasar, sehingga menyebabkan anak dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi demi keuntungan ekonomi yang juga merupakan tindakan eksploitasi ekonomi.

5) Kerugian yang Terjadi Akibat Pekerja Anak

Dalam pandangan ILO/IPEC, jika anak dibiarkan untuk bekerja, akan menuai masalah yang luas dan kompleks, diantaranya:

- a) *Penyangkalan hak-hak dasar anak, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, dan hak mendapatkan perlakuan yang baik.*
- b) *Tubuh anak masih terus berkembang dan belum terbentuk sepenuhnya. Pekerjaan tertentu dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu.*
- c) *Anak-anak lebih mudah terkontaminasi senyawa kimia dan radiasi berbahaya dibandingkan dengan orang dewasa.*
- d) *Daya tahan tubuh anak rentan terhadap penyakit.*
- e) *Anak-anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang terdapat eksploitasi, berbahaya, merendahkan harga diri dan terisolasi. Mereka sering kali mendapatkan perlakuan kasar, sewenang-wenang dan diabaikan majikannya.*
- f) *Anak-anak didorong memasuki dunia orang dewasa sebelum waktunya. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang penting untuk pertumbuhan mereka, misalnya bermain, bersekolah, bergaul dengan teman sebaya.*

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵³

Hak-hak anak secara universal diakui dalam Deklarasi Hak Anak-Anak (*Declaration of the Right of the Child*). Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan hak-hak anak. Secara garis besar Deklarasi memuat asas-asas sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh perlindungan khusus,
- b. Hak kesempatan dan fasilitas agar mereka dapat berkembang secara sehat.

[illegible]

Ketentuan mengenai larangan perdagangan anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan UU perlindungan anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang/anak secara tegas. Disamping itu dalam KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang di derita si korban akibat kejahatan perdagangan orang.⁵⁸ Hal diatas yang melatar balakangi dibentuknya UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini juga merupakan salah satu upaya melindungi anak dari eksploitasi ekonomi.

⁵⁸ UU RI No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, I

Di Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan Indonesia tidak lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di Indonesia membutuhkan peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak buruh, hak asasi manusia, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia perburuhan demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis. Pada tanggal 25 Maret 2003 disahkan UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.⁶⁵ Dalam UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

1. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15*

⁶⁵ UU RI No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Lembar Pengesahan Presiden RI oleh Megawati Soekarnoputri

dunia kerja kaitannya dengan eksploitasi ekonomi anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menjangkau permasalahan tersebut.

Istilah eksploitasi anak secara umum segala tindakan yang mengandung unsur dan juga mengakibatkan adanya nilai memanfaatkan anak-anak, oleh karenanya batasan eksploitasi ekonomi harus jelas, mengingat eksploitasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu eksploitasi seksual anak dan eksploitasi ekonomi anak. Berdasarkan pengertiannya kedua istilah tersebut dibedakan, akan tetapi pada hakikatnya keduanya saling berkaitan.

Pengertian eksploitasi seksual anak secara khusus eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memeras atau mengambil manfaat organ tubuh dan/atau seksual anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai seksual) untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Namun untuk pengertian eksploitasi seksual dalam bentuk yang lain sudah meluas menjadi atau mempunyai pengertian eksploitasi ekonomi anak misalnya tindakan atau perbuatan eksploitasi seks komersial anak yang artinya tindakan atau perbuatan memperlak, memeras atau mengambil manfaat organ dan/atau seksual anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Maka eksploitasi seks komersial anak juga termasuk dalam eksploitasi ekonomi anak karena terdapat unsur untuk memperoleh nilai ekonomi. Oleh karenanya dalam posisi hukum ketentuan mengenai eksploitasi seksual dan

Definisi eksploitasi ekonomi anak secara umum dapat diartikan tindakan atau perbuatan memperlalat, memeras atau mengambil manfaat (organ tubuh dan/atau seksual, jasa atau kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan dan secara khusus eksploitasi ekonomi anak diartikan sebagai tindakan atau perbuatan memperlalat, memeras atau mengambil manfaat (jasa atau kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Bentuk-bentuk tentang eksploitasi ekonomi anak jika didasarkan kepada pengertian eksploitasi ekonomi anak secara umum dan khusus maka diantara bentuk-bentuk eksploitasi yang terdiri dari perbudakan anak, perdagangan anak, kerja paksa atau pelayanan paksa oleh anak, dan mempekerjakan anak, yang masih mempunyai pengertian sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual anak adalah perdagangan anak. Perdagangan anak dapat berarti eksploitasi seksual anak dan dapat berarti eksploitasi ekonomi anak karena perdagangan anak dilakukan untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu keuntungan yang bernilai seksual dan juga untuk tujuan keuntungan yang bernilai ekonomi.

Kemudian bentuk perbudakan dan kerja paksa keduanya memang merupakan eksploitasi ekonomi namun namun pada praktiknya merupakan bentuk klasik dari perdagangan anak dan mempekerjakan anak.

Mengenai praktik-praktik yang serupa dengan eksploitasi ekonomi anak diantara bentuk-bentuk yang masuk dalam eksploitasi ekonomi diatas yaitu bentuk mempekerjakan anak karena bentuk mempekerjakan anak yang diakui Undang-undang mempunyai arti eksploitasi ekonomi anak adalah kerja paksa atau pelayanan paksa. Dan juga mempekerjakan anak pada hakikatnya diperbolehkan (bukan eksploitasi) sepanjang tidak ada unsur pemaksaan. Namun ukuran ini tidak menjamin anak-anak mendapatkan haknya dalam kehidupan sehari-hari karena ketika anak bekerja (sendiri, dalam usaha keluarga atau dalam perindustrian) hak-hak anak tidak dipenuhi dan anak-anak berada dalam keadaan terancam kesehatan, mental dan jiwanya yaitu berada dalam kondisi berbahaya. Terdapat 2 (dua) batasan pengertian tindakan mempekerjakan anak dikatakan sebagai eksploitasi ekonomi anak yaitu:

1. Berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan maka batasan terhadap nilai eksploitasi ekonomi anak sendiri bergantung pada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha boleh mempekerjakan anak di bawah umur 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan dengan syarat izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja

maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan di atas huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹ Jadi anak boleh bekerja dalam usaha keluarga walaupun tidak ada kejelasan dalam hubungan kerja dan selama unsur-unsur di atas tidak dipenuhi maka mempekerjakan anak merupakan eksploitasi ekonomi.

2. Kedua, batasan yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak dan dalam hal itu dapat disebut dalam nafkah (kebutuhan pokok) anak. Jadi singkatnya batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai eksploitasi ekonomi ketika anak bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa tersebut merupakan eksploitasi ekonomi anak. Jika anak bekerja selain untuk tujuan kemiskinan untuk mencukupi kebutuhan misalnya untuk pendidikan dan pelatihan dalam Instansi pemerintah maka bukan termasuk eksploitasi ekonomi anak.

Penulis sepakat untuk menjamin kelangsungan hak-hak anak diperbolehkan mempekerjakan anak dan tidak termasuk sebagai eksploitasi

¹ UU RI No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68-69

ekonomi anak ketika bekerja anak tidak berada dalam keadaan yang terancam fisik, jiwa dan mentalnya dan tidak untuk mencari nafkah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak dieksploitasi secara ekonomi dapat mengambil dari faktor-faktor anak berada dalam keadaan diperdagangkan dan dipekerjakan. Hal ini disebabkan dalam kondisi dieksploitasi dalam berbagai bentuk diperdagangkan misalnya, anak selalu berakhir dalam kondisi diharuskannya anak bekerja (seksual maupun ekonomi). Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah keadaan anak yang lemah dan rawan terhadap perlindungan diri, seorang anak memiliki kondisi fisik yang mendukung adanya eksploitasi ekonomi anak dan juga faktor kebutuhan ekonomi masyarakat dan permintaan pasar dalam dunia perdagangan dan permintaan dunia industri yang tinggi. Selain itu biaya produksi dapat ditekan dikarenakan nilai tawar anak rendah dan tidak banyak menuntut. Faktor yang juga menentukan adalah lemahnya kapasitas aparat dan penegak hukum.

Pokok pikiran tentang diberlakukannya larangan eksploitasi ekonomi anak oleh Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikembalikan kepada penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang tindakan eksploitasi ekonomi kepada anak di bawah umur:

1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a. *Kriminasi*
 - b. *Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual*
 - c. *Penelantaran*
 - d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
 - e. *Ketidakadilan, dan*
 - f. *Perlakuan salah lainnya.*
- 2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.³*

³ *ibid*, Pasal 13

mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga mengakibatkan anak-anak berada dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya. Oleh karenanya eksploitasi ekonomi anak dilarang.

Di dalam *uṣul fiqh* dikenal *istinbat* hukum untuk menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang menggunakan nilai kemaslahatan (kebaikan) untuk menetapkan suatu hukum yaitu *maslaḥah mursalah* yang mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia. Hal ini dapat menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*maslaḥah darūriyah*". *Maslaḥah darūriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada lima prinsip dasar hukum Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jadi untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam kehidupan masyarakat diperbolehkan atau diharamkan tergantung kepada kemaslahatan yaitu lima prinsip dasar. Jika akibat dari perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka perbuatan tersebut diharamkan. Jika tidak membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka diperbolehkan.

bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak sesuai dengan konsep dilarangnya mempekerjakan anak ketika anak berada dalam keadaan terancam jima, fisik dan mentalnya dengan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sebagai tindak eksploitasi ekonomi anak yang dilarang oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

